

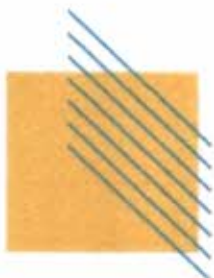


Pemerintah Kabupaten
Tanah Datar

PERUBAHAN RENCANA KERJA

2025

**BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER
DAYA MANUSIA**



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami sampaikan kepada Allah SWT karena limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 dapat terselesaikan dengan baik.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 adalah untuk menggambarkan secara menyeluruh tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang meliputi Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra SKPD serta Tujuan, Sasaran dan Program Kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2025.

Rencana kerja yang telah disusun ini tidak akan berarti banyak tanpa adanya implementasi dengan pelaksanaan yang tuntas, komitmen dan motivasi yang kuat dari seluruh jajaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

Akhir kata, kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan Rencana Kerja ini. Diharapkan Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 ini nantinya dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar kedepan.

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA
KABUPATEN TANAH DATAR



Drs. YUSRIZAL, MM

NIP. 196606011994031001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
 BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum.....	2
1.3 Maksud Dan Tujuan	4
1.4 Sistematika Penulisan.....	5
 BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025	6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra OPD.....	6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD	18
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD.....	21
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025	23
2.5. Penelaahan Usulan Program & Kegiatan Masyarakat	34
 BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025	35
 BAB V PENUTUP.....	40

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar Sampai Triwulan II Tahun Anggaran 2025	7
Tabel 2.2.	Pencapaian Kinerja BKPSDM Kab. Tanah Datar	20
Tabel 2.3.	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tanah Datar Tahun 2025	25
Tabel 3.1.	Rencana Kerja dan Pendanaan BKPSDM Tahun 2025	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara terpadu bagi peningkatan kesejahteraan rakyat dengan memanfaatkan dan memperhitungkan kemampuan sumber daya, informasi, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memperhatikan perkembangan global. Perencanaan pembangunan daerah sangat penting untuk merumuskan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), bahwa setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Untuk itu setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD, RPJMD dan serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD pasal 363 ayat (1) sampai ayat (3) bahwa Perangkat Daerah menyusun Perubahan Rencana Kerja Kerja paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah mempedomani Perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I.

Perubahan Renja Perangkat Daerah mencakup; analisis gambaran pelayanan perangkat daerah, analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan I tahun berkenaan dan penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah harus disampaikan paling

lambat 2 minggu setelah penetapan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD.

Bappedalitbang melakukan verifikasi terhadap rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Hasil verifikasi oleh Bappedalitbang disampaikan kepada SKPD untuk selanjutnya dilaksanakan penetapan Renja Perangkat Daerah oleh Kepala Perangkat Daerah. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah menjadi pedoman penyusunan perubahan RKA Perangkat Daerah.

Perubahan Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah dalam rangka mewujudkan pembangunan daerah yang sesuai dengan tujuan yang sudah ditetapkan. Sehingga visi dan misi Kepala Daerah Kabupaten Tanah Datar yang menjadi tanggung jawab Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Tanah Datar sebagai unsur kepegawaian daerah yang mengemban tugas dan tanggung jawab pengelolaan kepegawaian di Kabupaten Tanah Datar dapat tercapai.

1.2 DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang

- Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);;
 5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2024 tentang Kabupaten Tanah Datar di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6973);
 6. Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 5 Tahun 2010 tentang Prosedur Perencanaan Pembangunan Partisipatif (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2010 Nomor 3 Seri E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 53).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 29);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 40);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2023 Nomor 11);
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tanah Datar 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 58).
 16. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 11 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penetapan perubahan rencana kerja ini adalah untuk memberikan panduan dan dasar pelaksanaan kegiatan bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar untuk mencapai keadaan yang diinginkan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Secara umum tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 adalah merumuskan dan menetapkan strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas kepegawaian sebagai upaya mewujudkan kepegawaian daerah yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2021-2026.

Secara spesifik tujuan disusun Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia antara lain :

1. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan sumber daya secara optimal untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
2. Tersedianya instrumen awal untuk pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai kinerja organisasi;
3. Tersedianya instrumen yang akan menjadi panduan setiap pegawai di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar dalam berpikir, bersikap dan bertindak untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk Dapat memberikan pemahaman yang jelas dan sistematis maka dalam menyusun Perubahan Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 ini dibuat dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I	PENDAHULUAN
	1.1 Latar belakang
	1.2 Dasar hukum
	1.3 Maksud dan tujuan
	1.4 Sistematika penulisan
BAB II	EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025
	2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sampai Triwulan II dan Capaian Renstra BKPSDM
	2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
	2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi BKPSDM Kab. Tanah Datar
	2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025
BAB IV	PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2025

2.1. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SAMPAI TRIWULAN II DAN CAPAIAN RENSTRA BKPSDM

Dalam Renja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 ini dilakukan analisa terhadap pencapaian kinerja Perangkat Daerah sampai tahun 2024 yang bertujuan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pelayanan Perangkat Daerah ditinjau dari pelaksanaan kinerja terhadap Renja periode sebelumnya, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4 Evaluasi Terhadap Hasil Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar
Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2025

[illegible]

1	2	3	4	5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15	
				K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
5 03 01 2 06 01		Persediaan komponen investasi ke/kegiatan yang berwujud lainnya	Jumlah jenis komponen investasi ke/kegiatan yang berwujud lainnya	09	52.467.900	30	8.093.600		1.000.000			1	-			39	8.093.600,00	43,88%					39	8.093.600,00	15,42% BKPSDM
5 03 01 2 06 04		Persediaan Bahan Lokal Kotor	Jumlah jenis dan jenis bahan lokal kotor	354	302.903.069	155	98.806.800		18.383.663																
			Jumlah paket komponen investasi ke/kegiatan yang berwujud lainnya	12		8																			
5 03 01 2 06 05		Persediaan barang sediaan dan perlengkapan	Jumlah jenis dan jenis barang sediaan dan perlengkapan	149	245.996.525	66	58.043.400		6.546.400			3	2.841.050												
			Jumlah ekumen yang diadatkan	28.284																					
			Jumlah paket barang sediaan dan perlengkapan yang diadatkan	13								3													
5 03 01 2 06 06		Persediaan bahan baku dan perlengkapan dengan perantara	Jumlah jenis dan jenis bahan baku dan perlengkapan dengan perantara	72	52.000.000	48	14.919.000		5.300.000			3	766.000												
			Jumlah bahan baku dan perlengkapan dengan perantara yang diadatkan	8		1																			
5 03 01 2 06 08		Persediaan barang modal	Jumlah jenis dan jenis barang modal	72	57.456.400	48	15.808.100		5.920.000			3	151.000												
			Jumlah barang modal	10								3													
5 03 01 2 06 09		Persediaan barang modal	Jumlah jenis dan jenis barang modal	72	825.465.000	48	242.987.500		60.000.000			3	7.928.050												
			Jumlah barang modal	35								5													
5 03 01 2 07		Persediaan barang modal	Jumlah jenis dan jenis barang modal		259.166.071,25		251.893.200,20		7.000.000,00			6	-												
5 03 01 2 07 02		Persediaan barang modal	Jumlah jenis dan jenis barang modal																						
5 03 01 2 07 05		Persediaan barang modal	Jumlah jenis dan jenis barang modal	31	82.864.465,73	2	44.593.000																		
5 03 01 2 07 06		Persediaan barang modal	Jumlah jenis dan jenis barang modal	33	275.261.562,50	20	207.772.000		7.000.000			1													
5 03 01 2 07 08		Persediaan barang modal	Jumlah jenis dan jenis barang modal																						
5 03 01 2 08		Persediaan barang modal	Jumlah jenis dan jenis barang modal																						
5 03 01 2 08 01		Persediaan barang modal	Jumlah jenis dan jenis barang modal	2848	105.100.000	375	56.647.150		28.364.400			45	5.182.100												
			Jumlah barang modal	550		50						0													
5 03 01 2 08 02		Persediaan barang modal	Jumlah jenis dan jenis barang modal	72		48						3													
			Jumlah barang modal	11		1																			
5 03 01 2 08 03		Persediaan barang modal	Jumlah jenis dan jenis barang modal	268	314.998.000	144	195.707.400		77.196.000			12	13.740.146												
			Jumlah barang modal																						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5 03 02 2 01 00	Menyediakan fasilitas layanan ASN	Fasilitas Layanan ASN	Jumlah Organisasi yang terdapat ASN	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	BP/SDM
5 03 02 2 01 01	Menyediakan pelayanan administrasi kepegawaian	Pengadaan Sistem Informasi Kepegawaian	organisasi	1	819.999.000	1	51.000.000	-	-	-	1,00	4	232.416.075,00	28,34%
5 03 02 2 01 11	Menyediakan pelayanan administrasi kepegawaian	Pengadaan Data Kepegawaian	document	7	254.999.720	1	9.000.000	-	-	-	1	1.579.690	64.481.675,00	25,29%
5 03 02 2 01 11	Menyediakan pelayanan administrasi kepegawaian	Pengadaan Data Kepegawaian	document	1138	295.000.000	343	20.293.045	-	-	-	82	425	20.293.045,00	9,93%
5 03 02 2 02	Menyediakan pelayanan administrasi kepegawaian	Mutasi dan Promosi ASN	document	2500	612	0	0	-	-	-	0	612	24,48%	BP/SDM
5 03 02 2 02 01	Menyediakan pelayanan administrasi kepegawaian	Pengadaan Mutasi ASN	document	450	311.999.775	0	16.500.000	-	-	-	0	40,57%	130.700.000	140,90%
5 03 02 2 02 02	Menyediakan pelayanan administrasi kepegawaian	Pengadaan Promosi ASN	document	4200	434.999.075	2369	132.100.275	-	-	-	415	2777	136.536.020,00	31,42%
5 03 02 2 02 03	Menyediakan pelayanan administrasi kepegawaian	Pengadaan Promosi ASN	document	1500	1.329.299.050	2483	841.610.530	-	-	-	54	2567	957.666.089,00	72,10%
5 03 02 2 03	Menyediakan pelayanan administrasi kepegawaian	Pengembangan Kompetensi	document	19	4.200.800.483	4	42.567.500	-	-	-	13	32	4.257.112.983	28,40%
5 03 02 2 03 01	Menyediakan pelayanan administrasi kepegawaian	Pengembangan Kompetensi ASN	document	75	854.999.075	149	315.290.525	-	-	-	0	149	343.386.825,00	41,12%
5 03 02 2 03 02	Menyediakan pelayanan administrasi kepegawaian	Pengembangan Kompetensi ASN	document	65	16.245.697.721	8	16.245.697.721	-	-	-	1	10	15,38%	BP/SDM
5 03 02 2 03 03	Menyediakan pelayanan administrasi kepegawaian	Pengembangan Kompetensi ASN	document	50	556.999.800	9	50.386.800	-	-	-	68	12	50.386.800,00	8,53%
5 03 02 2 03 04	Menyediakan pelayanan administrasi kepegawaian	Pengembangan Kompetensi ASN	document	6	3	3	3	-	-	-	0	3	50,00%	BP/SDM
5 03 02 2 03 05	Menyediakan pelayanan administrasi kepegawaian	Pengembangan Kompetensi ASN	document	13	4	4	4	-	-	-	0	4	30,77%	BP/SDM
5 03 02 2 03 06	Menyediakan pelayanan administrasi kepegawaian	Pengembangan Kompetensi ASN	document	4	4	4	4	-	-	-	0	4	30,77%	BP/SDM

Berikut akan diuraikan capaian kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar sampai triwulan II tahun anggaran 2025:

Alokasi anggaran BKPSDM pada Tahun anggaran 2025 sebesar Rp.4.951.351.874. Realisasi anggaran Sampai bulan Juni 2025 sebesar Rp.2.428.902.565 atau 49,06%. Untuk capaian kinerja pada sampai bulan Juni 2025 sebesar 54,83%. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar dan Pencapaian Perencanaan Strategis (Renstra) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar triwulan II tahun 2025, dapat dijelaskan berikut ini:

a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Realisasi program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp.2.160.757.906 atau sebesar 53,25% dari anggaran sebesar Rp.4.057.623.274. Realisasi kinerja kegiatan ini sebesar 50,18%. Rincian Realisasi program kegiatan ini dijelaskan sebagai berikut::

1. Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah

Saat ini dokumen perencanaan dalam tahap penyusunan Rancangan Rencana Kerja Tahun 2026, Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2025 dan Rancangan Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

2. Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD

Telah ditetapkan 2 (dua) dokumen pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2025, yang terdiri dari DPA Tahun 2025 dan DPA Pergeseran Tahap I Tahun Anggaran 2025.

3. Koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKP

Telah ditetapkan dokumen 11 (sebelas) Laporan capaian kinerja BKPSDM yang terdiri dari: Laporan kinerja instansi Pemerintah Tahun 2024, Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Tahun 2024, dan 6 (enam) laporan realisasi anggaran bulan Januari s/d Juni Tahun Anggaran 2025, 1 (satu) laporan

evaluasi Renja Triwulan I Tahun Anggaran 2025, dan 1 laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II Tahun 2025.

4. Penyediaan gaji dan tunjangan ASN

Capaian kinerja kegiatan ini berupa pembayaran gaji 30 ASN pada BKPSDM.

5. Koordinasi dan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun SKPD

Telah ditetapkan 1 (satu) dokumen laporan Keuangan BKPSDM Tahun 2024.

6. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Capaian kinerja sub kegiatan ini berupa 1 (satu) paket komponen instalasi listrik.

7. Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Target kinerja sub kegiatan ini adalah 9 (Sembilan) paket penyediaan logistik kantor.

8. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Capaian kinerja sub kegiatan ini berupa penyediaan barang cetakan sebanyak 3 (tiga) paket.

9. Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan

Telah dilaksanakan penyediaan bahan bacaan sebanyak 386 dokumen.

10. Fasilitas Kunjungan Tamu

Telah disusun 6 laporan penyediaan makanan dan minuman bagi tamu BKPSDM.

11. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Telah disusun laporan pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi sebanyak 9 laporan.

12. Pengadaan peralatan dan mesin lainnya

Pada tahun ini direncanakan pengadaan 1 unit peralatan dan mesin lainnya.

13. Penyediaan jasa surat menyurat

Target kinerja sub kegiatan ini berupa laporan penyediaan jasa surat menyurat sebanyak 1 laporan.

14. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
Telah dilaksanakan pembayaran 24 tagihan Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik.
 15. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Telah disusun 6 laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan.
 16. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
Telah dilaksanakan pemeliharaan dan pembayaran pajak 10 unit kendaraan dinas.
 17. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Telah diperbaiki 8 unit peralatan dan mesin BKPSDM.
 18. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya
Capaian kinerja kegiatan ini berupa pemeliharaan gedung kantor BKPSDM.
- b. Program Kepegawaian Daerah
- Realisasi program Kepegawaian Daerah sebesar Rp.268.144.659 atau sebesar 30% dari anggaran sebesar Rp.835.352.900. Realisasi kinerja kegiatan ini sebesar 61,31%. Rincian Realisasi program kegiatan ini dijelaskan sebagai berikut:
1. Penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN
Capaian kinerja kegiatan ini adalah 1 (satu) dokumen Usulan kebutuhan ASN disampaikan ke Kementerian PAN dan RB dan Badan Kepegawaian Negara.
 2. Koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK
Telah tersusun 2 laporan pelaksanaan pengadaan ASN Tahun 2024 yang terdiri dari 1 laporan pengadaan PNS dan 1 laporan pengadaan PPPK. Pada triwulan II telah dilaksanakan penyerahan SK untuk 46 orang PNS dan penyelesaian SK PPPK sebanyak 12 orang.

Gambar 2.1
Penyerahan SK CPNS formasi Tahun 2024 oleh Bupati Tanah Datar



3. Koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian
Telah ditetapkan 167 SK pensiun berdasarkan Batas Usia Pensiun (BUP) dan 3 (tiga) SK pensiun Atas Permintaan Sendiri (APS), 11 SK Pensiun Janda/Duda dan 4 (empat) SK Pemberhentian.
4. Fasilitasi lembaga profesi ASN
Telah dilaksanakan fasilitasi terhadap pelaksanaan kegiatan Korpri Kabupaten Tanah Datar.
5. Pengelolaan sistem informasi kepegawaian
Capaian Kinerja kegiatan ini berupa peremajaan data PNS pada aplikasi Silamak dan penerbitan bezetting PNS Kabupaten Tanah Datar. Pada tahun 2025 telah diterbitkan 1 dokumen Bezetting ASN Kabupaten Tanah Datar.
6. Pengelolaan mutasi ASN
Telah diterbitkan 1 (satu) dokumen Pengangkatan Penjabat Sekretaris Daerah, 18 dokumen pengangkatan dalam jabatan administrator, 23 dokumen pengangkatan dalam jabatan pengawas, 61 mutasi jabatan non manajerial, 7 (tujuh) dokumen mutasi PNS pindah ke dalam Kabupaten Tanah Datar, 4 (empat) dokumen mutasi PNS keluar Kabupaten Tanah Datar.

Gambar 2.2
Pelantikan Pejabat Manajerial oleh Bupati Tanah Datar di Aula
Kantor Bupati Tanah Datar



7. Pengelolaan kenaikan pangkat ASN

Telah diterbitkan 418 dokumen SK Kenaikan Pangkat PNS.

8. Pengelolaan promosi ASN

Capaian kinerja kegiatan ini adalah 13 dokumen pengelolaan promosi ASN yang terdiri dari 6 (enam) dokumen penilaian kinerja oleh Tim Penilaian Kinerja dan 4 (empat) dokumen pelaksanaan pengisian jabatan pimpinan tinggi dan 3 (tiga) dokumen pelaksanaan mutasi jabatan pimpinan tinggi.

Gambar 2.3
Pelaksanaan Wawancara Peserta Seleksi Terbuka Jabatan
Sekretaris Daerah Kabupaten Tanah Datar



9. Peningkatan kapasitas kinerja ASN

Telah dilaksanakan pengiriman 1 (satu) peserta pelatihan untuk uji kompetensi jabatan P2UPD, 2 (dua) peserta pelatihan anti korupsi, 4 (empat) peserta pelatihan SAR, 5 (lima) peserta pelatihan Trantibum, 5 (lima) peserta pelatihan

SPM, 2 (dua) peserta uji kompetensi jabatan fungsional pertanian, 1 (satu) peserta uji kompetensi Instruktur, 2 (dua) peserta pelatihan fungsional analisis kebijakan dan 46 peserta pelatihan PBB bagi CPNS.

Gambar 2.4
Pelaksanaan Pembekalan PBB bagi CPNS formasi Tahun 2024
oleh Satpol PP dan Damkar



10. Pengelolaan pendidikan lanjutan ASN

Capaian kinerja kegiatan ini berupa 25 orang ASN mendapatkan pendidikan lanjutan yang terdiri dari 3 orang pemberian SK tugas belajar dan 22 orang diberikan izin belajar. Selain itu juga diberikan bantuan pendidikan yang terdiri dari 1 (satu) orang ASN diberikan biaya pendidikan S2, 5 (lima) orang mengikuti S2 dengan program cost sharing antara Pemerintah Daerah dengan Bappenas dan 7 orang Mahasiswa STTD diberikan bantuan biaya penunjang pendidikan melalui jalur ikatan dinas berdasarkan MoU antara Pemerintah Daerah dengan STTD.

11. Pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur

Capaian kinerja kegiatan ini berupa 1 (satu) dokumen analisis kesenjangan kinerja ASN Kabupaten Tanah Datar tahun 2025.

12. Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai

Telah dilaksanakan proses pengusulan penerima satya lancana karya satya ke Kementerian Dalam Negeri.

13. Pengelolaan Disiplin ASN

Telah ditetapkan 4 (empat) laporan penetapan SK hukuman disiplin bagi PNS yang melakukan pelanggaran disiplin dan 6 laporan hasil penyelesaian proses perceraian ASN berupa surat izin melakukan perceraian bagi PNS.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Secara umum Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai perangkat daerah di Kabupaten Tanah Datar untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Dalam melaksanakan program dan kegiatan yang bersifat administratif maupun bersifat teknis secara proposional telah berjalan dengan baik. Indikator keberhasilan terhadap pelaksanaan tugas ini adalah adanya komitmen kerja yang baik antara Kepala Badan beserta bawahannya dan penguasaan di bidang tugas masing-masing pegawai dengan baik.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2023 dan Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia. Sedangkan fungsi dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar sebagai berikut:

- b. perumusan kebijakan teknis kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia di bidang pengadaan, penempatan pegawai dalam jabatan, pembinaan dan informasi kepegawaian, kepangkatan dan pensiun, serta pengembangan sumber daya manusia;

- c. pengkoordinasian penyusunan teknis kepegawaian di bidang pengadaan, penempatan pegawai dalam jabatan, pembinaan, informasi kepegawaian, kepangkatan dan pensiun serta pengembangan sumber daya manusia;
- d. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sesuai dengan Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021-2026, berikut ini disajikan pencapaian kinerja pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

Tabel 2.2. Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar

NO	Indikator	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah					Realisasi Capaian			Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1	Indeks Profesionalitas ASN	-	Indeks Profesionalitas ASN	73	75	77	79	81	73,37	79,8	84,56	-
2	Persentase formasi jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan pengawas yang terisi sesuai dengan ANJAB dan ABK	-	Persentase formasi jabatan pimpinan tinggi, administrasi dan pengawas yang terisi sesuai dengan ANJAB dan ABK	94	95	96	97	98	97,60	101,88	99,74	-
3	Persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN	-	Persentase pelanggaran disiplin ASN	0,037	0,035	0,030	0,028	0,026	0,038%	0,37%	0,018	-
4	Persentase penyelesaian SK Kepegawaian (SK Pensiun, SK Pangkat dan SK Jabatan) yang tepat waktu sesuai dengan SOP	-	Persentase penyelesaian SK Kepegawaian (SK Pensiun, SK Pangkat dan SK Jabatan) yang tepat waktu sesuai dengan SOP	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	-
5	Persentase data ASN yang telah di update	-	Persentase data ASN yang telah di update	100	100	100	100	100	100%	100%	100%	-
6	Nilai SAKIP		Nilai SAKIP	75	76	78	80	81	74,58	75,60	76,50	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI BKPSDM KAB. TANAH DATAR

Upaya mewujudkan aparatur sipil negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, dalam hal mengembangkan aparatur sipil negara sebagai profesi yang memiliki kewajiban mengelola dan mengembangkan dirinya dan wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya serta menerapkan prinsip sistem merit dalam pelaksanaan manajemen aparatur sipil negara diatur dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara.

Sebagai salah satu organisasi perangkat daerah BKPSDM memiliki fungsi sebagai perumus kebijakan teknis dan koordinator untuk urusan kepegawaian dan SDM di bidang pengadaan, penempatan pegawai dalam jabatan, pembinaan dan informasi kepegawaian, kepangkatan dan pensiun, serta pengembangan sumber daya manusia.

Dalam menetapkan tujuan organisasi dan program kerja, BKPSDM harus memperhatikan isu-isu strategis dan peraturan terbaru terkait kepegawaian. Isu-isu strategis dan peraturan terbaru terkait kepegawaian adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara

Terbitnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara pada tanggal 31 Oktober 2023 mencabut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 masih menunggu Peraturan Pemerintah untuk pelaksanaannya. Ada beberapa proses administrasi kepegawaian yang mengalami perubahan diantaranya:

- a. Pengembangan talenta dan karier dilakukan dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kebutuhan Instansi Pemerintah.

Untuk itu sangat dibutuhkan Standar Kompetensi Jabatan dan dokumen rencana suksesi sebagai dasar pelaksanaan promosi dan mutasi ASN. Proses pengembangan talenta dan karier dilaksanakan melalui mobilitas talenta yang dapat dilakukan:

- 1) Dalam 1 (satu) Instansi Pemerintah;
- 2) Antar Instansi Pemerintah
- 3) Keluar Instansi Pemerintah.

Presiden memiliki kewenangan untuk melaksanakan sistem mobilitas talenta secara Nasional untuk mendukung prioritas pembangunan Nasional.

- b. Berdasarkan pasal 65 dan 66 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023, Pejabat Pembina Kepegawaian dilarang untuk mengangkat pegawai Non ASN untuk mengisi jabatan ASN. Pejabat Pembinaan Kepegawaian diberikan waktu untuk penataan pegawai non ASN sampai 31 Desember 2023.

- c. Digitalisasi manajemen ASN

Digitalisasi layanan kepegawaian bertujuan untuk menjamin efisiensi, efektivitas dan akurasi penyelenggaraan proses dan pengambilan keputusan dalam manajemen ASN.

2. Peningkatan kualitas ASN

Salah satu program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Tanah Datar periode 2021-2026 adalah meningkatkan kesejahteraan dan kualitas ASN dan tenaga honorer. Untuk peningkatan kualitas ASN, salah satu tolak ukurnya adalah Indeks Profesionalitas ASN. Menurut Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019, pengertian dari IP-ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN yang berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melakukan tugas jabatannya. IP ASN bertujuan untuk mengetahui sejauh mana seorang ASN telah memenuhi kewajibannya berdasarkan tugas dan jabatannya. Pengukuran ini bermanfaat dilihat dari beberapa sudut pandang. Bagi Pemerintah, dapat digunakan sebagai dasar perumusan dalam rangka pengembangan ASN secara organisasi hal ini dapat dilihat pada capaian kinerjanya. Bagi masyarakat, dapat digunakan sebagai instrumen kontrol sosial agar pegawai ASN selalu bertindak profesional terutama dalam kaitannya terhadap pelayanan publik yang diberikan pegawai tersebut. Dalam penghitungan Indeks Profesionalitas ASN indikator penghitungannya adalah:

- a. Dimensi Kualifikasi

Dimensi kualifikasi digunakan untuk mengukur data/informasi tingkat pendidikan PNS.

b. Dimensi Kompetensi

Dimensi kompetensi digunakan untuk mengukur pengembangan kompetensi yang diperoleh PNS dalam satu tahun tergantung dengan jabatan yang dimilikinya. Pengembangan kompetensi ini dalam bentuk Pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, seminar, kursus, magang dan bentuk lainnya.

c. Dimensi Kinerja

Dimensi kinerja digunakan untuk mengukur capaian sasaran kinerja PNS.

d. Dimensi Disiplin

Dimensi Disiplin digunakan untuk mengukur data/informasi hukuman disiplin yang pernah diterima oleh PNS.

Untuk peningkatan IP ASN Kabupaten Tanah Datar maka perlu adanya sinergi antara seluruh organisasi perangkat daerah. Masing-masing dimensi sangat tergantung kepada pembinaan atasan dalam peningkatan profesionalitas ASN dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Salah satu sasaran kinerja Kabupaten Tanah Datar adalah Meningkatnya birokrasi yang kafabel, dengan indikator kinerja Indeks Profesionalitas ASN". Untuk mendukung pencapaian indikator tersebut, maka yang menjadi titik berat program tahun 2025 pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dapat dijelaskan pada kegiatan dibawah ini:

1. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Sarana dan prasarana aparatur mempengaruhi kinerja pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, sehingga setiap tahun harus dilaksanakan evaluasi dari sarana dan prasarana yang tersedia. Hal ini diharapkan dengan tersedianya sarana dan prasarana yang representatif akan menunjang pencapaian target kegiatan yang direncanakan.

2. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepagawaian ASN

Dengan kegiatan ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan ASN guna menjalankan fungsi pemerintahan pada Pemerintah Daerah dengan kualifikasi dan kompetensi yang telah ditentukan.

3. Kegiatan Mutasi dan Promosi ASN

Dengan kegiatan ini diharapkan ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar ditempatkan sesuai dengan kompetensinya serta jenjang karir yang jelas dan terarah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Kegiatan ini diharapkan ASN Kabupaten Tanah Datar memiliki kompetensi yang sesuai dengan jabatan yang diembannya, sehingga tidak terjadi kesenjangan antara pendidikan dan kompetensi yang dimilikinya serta memiliki kompetensi yang baik dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu perlu dilakukakan uji kompetensi bagi ASN untuk dasar penyusunan dokumen manajemen talenta ASN Kabupaten Tanah Datar.

5. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

Kegiatan ini diharapkan dapat mengevaluasi kinerja ASN di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Tanah Datar sehingga dapat diberikan Penghargaan ataupun hukuman disiplin atas kinerja ASN tersebut.

Tabel 2.3 Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2025 Kabupaten Tanah Datar

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting	
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Catatan Penting
	Kepegawaian				4.951.351.874	Kepegawaian				5.048.484.574	
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batusangkar			4.057.623.274	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Batusangkar			4.027.116.974	
	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.750.000	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.750.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen perencanaan daerah Outcome: Meningkatnya kualitas perencanaan	3 dokumen	2.250.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen perencanaan daerah Outcome: Meningkatnya kualitas perencanaan	3 dokumen	3.875.000	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA – SKPD	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD Outcome: Meningkatnya kualitas perencanaan	4 dokumen	4.500.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA –SKPD	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD Outcome: Meningkatnya kualitas perencanaan	3 dokumen	4.500.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Batusangkar	Output: Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian	15 laporan	3.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi	Batusangkar	Output: Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian	23 laporan	1.375.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	
	Kinerja SKPD		kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Outcome: Meningkatnya kualitas laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD			Kinerja SKPD		kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Outcome: Meningkatnya kualitas laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.621.916.311	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.587.410.011
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batusangkar	Output: Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Outcome: Peningkatan kualitas administrasi keuangan BKPSDM	30 orang	3.619.916.311	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Batusangkar	Output: Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Outcome: Peningkatan kualitas administrasi keuangan BKPSDM	30 orang	3.585.410.011
	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Batusangkar	Output: Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Outcome: Peningkatan kualitas administrasi keuangan BKPSDM	2 Laporan	2.000.000	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Batusangkar	Output: Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Outcome: Peningkatan kualitas administrasi keuangan BKPSDM	2 laporan	2.000.000
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				0
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Batusangkar	Output: Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan	2 orang	0	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas	Batusangkar	Output: Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan	-	0

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	dan Fungsi		dan pelatihan Outcome: Peningkatan kompetensi ASN di lingkungan BKPSDM			dan Fungsi		Peningkatan kompetensi ASN di lingkungan BKPSDM			
	Administrasi Umum Perangkat Daerah				97.235.063	Administrasi Umum Perangkat Daerah				95.735.063	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batusangkar	Output: Jumlah paket komponen listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan Outcome: Terpenuhiya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	5 paket	1.000.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batusangkar	Jumlah paket komponen listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan Output: Terpenuhiya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	3 paket	2.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batusangkar	Output: Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Outcome: Terpenuhiya kebutuhan logistik kantor	10 paket	18.888.663	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Batusangkar	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Output: Terpenuhiya kebutuhan logistik kantor	8 paket	16.388.663	
	Penyediaan barang dan pengadaan	Batusangkar	Output: Jumlah paket barang cetakan dan yang pengandaan disediakan Outcome: Terpenuhiya kebutuhan barang cetakan dan pengandaan	13 paket	6.546.400	Penyediaan barang dan cetakan dan pengandaan	Batusangkar	Jumlah paket barang cetakan dan pengandaan yang disediakan Output: Terpenuhiya kebutuhan barang cetakan dan pengandaan	9 paket	6.546.400	
	Penyediaan bahan dan perundang-undangan	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Outcome: Tersedianya	782 dokumen	5.300.000	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Batusangkar	Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Output: Tersedianya bahan	902 dokumen	6.300.000	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			bahan bacaan dan perundang-undangan					bacaan dan perundang-undangan			
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Batusangkar	Output: Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu Outcome: terfasilitasinya tamu BKPSDM	12 laporan	5.500.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Batusangkar	Output: Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu Outcome: terfasilitasinya tamu BKPSDM	12 laporan	4.500.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batusangkar	Output: Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Outcome: Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	35 laporan	60.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Batusangkar	Output: Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Outcome: Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30 laporan	60.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batusangkar	Output: Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan Outcome: Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas BKPSDM	1 unit	7.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Batusangkar	Output: Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan Outcome: Peningkatan kualitas sarana dan prasarana Perangkat Daerah	1 unit	7.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				135.060.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				130.060.400	
	Penyediaan jasa surat menyurat	Batusangkar	Output: Jumlah laporan penyediaan jasa surat	1 laporan	28.364.400	Penyediaan jasa surat menyurat	Batusangkar	Output: Jumlah laporan penyediaan jasa surat	1 laporan	28.364.400	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			menyurat Outcome: Terlaksananya proses pengiriman surat menyurat								
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Batusangkar	Output: Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Outcome: Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	12 laporan	77.196.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Batusangkar	Output: Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Outcome: Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	12 laporan	72.196.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batusangkar	Output: Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Outcome: Terselenggaranya jasa pelayanan umum kantor sesuai dengan kebutuhan	12 laporan	29.500.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Batusangkar	Output: Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Outcome: Terselenggaranya jasa pelayanan umum kantor sesuai dengan kebutuhan	12 laporan	29.500.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				186.661.500	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				197.161.500	
	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau	Batusangkar	Output: Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Outcome: terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan Perangkat	11 unit	145.000.500	Penyedia jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak, perizinan kendaraan dinas operasional atau	Batusangkar	Output: Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Outcome: terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau lapangan Perangkat	10 unit	155.500.500	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan				Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	
	lapangan		Daerah			lapangan		Daerah		
	Pemeliharaan dan Peralatan Mesin Lainnya	Batusangkar	Output: Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Outcome: Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	36 unit	10.000.000	Pemeliharaan dan Peralatan Mesin Lainnya	Batusangkar	Output: Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Outcome: Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	34 unit	10.000.000
	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Batusangkar	Output: Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi Outcome: Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	31.661.000	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Batusangkar	Output: Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi Outcome: Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	1 unit	31.661.000
	Program Kepegawaian Daerah				893.728.600	Program Kepegawaian Daerah				1.021.367.600
	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				195.037.500	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN				188.037.500
	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN Outcome: Tersusunnya rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	1 dokumen	13.000.000	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN Outcome: Tersusunnya rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	1 dokumen	14.000.000
	Koordinasi dan Fasilitas PNS	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitas PNS	65 dokumen	117.593.500	Koordinasi dan Fasilitas PNS	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitas PNS	3 dokumen	95.593.500

Rancangan Awal RKPD											Hasil Analisis Kebutuhan			Catatan Penting
No.	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)				
	dan PPPK		dan PPPK Outcome: Terpenuhiya kebutuhan ASN			dan PPPK		pppk Outcome: Terpenuhiya kebutuhan ASN						
	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian PNS	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian Outcome: Terlaksananya proses administrasi pemberhentian ASN sesuai dengan SOP	350 dokumen	4.444.000	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian PNS	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian Outcome: Terlaksananya proses administrasi pemberhentian ASN sesuai dengan SOP	350 dokumen	4.444.000				
	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Batusangkar	Output: Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi Outcome: Terfasilitasinya lembaga profesi ASN	1 lembaga	51.000.000	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Batusangkar	Output: Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi Outcome: Terfasilitasinya lembaga profesi ASN	1 lembaga	50.000.000				
	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian Outcome: Terkelolanya sistem informasi kepegawaian yang menyediakan data kepegawaian yang update	1 dokumen	9.000.000	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian Outcome: Terkelolanya sistem informasi kepegawaian yang menyediakan data kepegawaian yang update	1 dokumen	24.000.000				
	Pengelolaan Data Kepegawaian	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian Output: Persentase jumlah ASN yang memiliki data kepegawaian	100 dokumen	0	Pengelolaan Data Kepegawaian	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen hasil pengelolaan data kepegawaian Output: Persentase jumlah ASN yang memiliki data kepegawaian	100 dokumen	0				
	Mutasi dan Promosi ASN				212.638.000	Mutasi dan Promosi ASN				349.277.000				
	Pengelolaan Mutasi ASN	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi	200	16.500.000	Pengelolaan Mutasi ASN	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi	400	28.139.000				

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
			Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN Outcome: Terlaksananya pengembangan karier PNS	dokumen				Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar daerah Outcome: Terlaksananya pengembangan karier PNS	dokumen		
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Batusangkar	Output: Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN Outcome: Terlaksananya pengembangan karier PNS	700 dokumen	15.856.000	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Batusangkar	Output: Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN Outcome: Terlaksananya pengembangan karier PNS	700 dokumen	20.856.000	
	Pengelolaan Promosi ASN	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN Outcome: Terlaksananya pengembangan karier PNS	50 dokumen	180.282.000	Pengelolaan Promosi ASN	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN Outcome: Terlaksananya pengembangan karier PNS	30 dokumen	300.282.000	
	Pengembangan Kompetensi ASN				453.999.700	Pengembangan Kompetensi ASN				446.557.300	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Batusangkar	Output: Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya Outcome: Peningkatan profesionalitas ASN	690 orang	293.000.000	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Batusangkar	Output: Jumlah ASN yang meningkat kapasitasnya Outcome: Peningkatan profesionalitas ASN	95 orang	307.781.800	
	Pengelolaan Assesment Center	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen pengelolaan assesment center Outcome: Terkelolanya assesment center	2 dokumen	0	Pengelolaan Assesment Center	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen pengelolaan assesment center Outcome: Terkelolanya assesment center	-	0	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Batusangkar	Output: Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan Outcome: Peningkatan profesionalitas ASN	20 orang	160.999.700	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Batusangkar	Output: Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan Outcome: Peningkatan profesionalitas ASN	40 orang	138.775.500	
	Penilaian dan Evaluasi Kinerja				32.053.400	Penilaian dan Evaluasi Kinerja				37.495.800	

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)	
	Aparatur					Aparatur					
	Pelaksanaan dan Penilaian Evaluasi Kinerja Aparatur	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Outcome: Peningkatan profesionalitas ASN	1 dokumen	7.903.400	Pelaksanaan dan Penilaian Evaluasi Kinerja Aparatur	Batusangkar	Output: Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Outcome: Peningkatan profesionalitas ASN	1 dokumen	7.903.400	
	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Batusangkar	Output: Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa Outcome: Terlaksananya pemberian tanda jasa bagi pegawai	315 orang	11.500.000	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Batusangkar	Output: Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa Outcome: Terlaksananya pemberian tanda jasa bagi pegawai	315 orang	11.500.000	
	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Batusangkar	Output: Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN Outcome: Terlaksananya pemrosesan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN sesuai dengan ketentuan	5 laporan	12.650.000	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Batusangkar	Output: Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN Outcome: Terlaksananya pemrosesan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN sesuai dengan ketentuan	7 laporan	18.092.400	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tidak ada usulan program dan kegiatan masyarakat yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang Kabupaten/Kota.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN TAHUN 2025

Program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar yang akan dilaksanakan merupakan bagian dari Program Pembangunan Kabupaten Tanah Datar yang berisi program prioritas dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Rencana program dan kegiatan disusun untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan sejalan dengan arah dan kebijakan maupun strategi selama periode perencanaan.

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar melaksanakan urusan pemerintahan fungsi penunjang kepegawaian. Sedangkan Program strategis yang dilaksanakan berdasarkan RPJMD Kabupaten Tanah Datar sebanyak 2 (dua) Program yaitu:

1. Program penunjang urusan pemerintah daerah
2. Program Kepegawaian

Berdasarkan analisa capaian kinerja kinerja tahun lalu serta mempertimbangan isu-isu strategis di bidang pengelolaan sumber daya aparatur ASN, serta untuk mendukung terwujudnya tujuan pembangunan nasional umumnya serta pembangunan Kab. Tanah Datar khususnya, maka dirumuskan perubahan rencana kerja Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025.

Agar kegiatan dapat terukur dan memudahkan pelaksanaan evaluasi, maka masing-masing kegiatan diikuti dengan indikator dan target kinerja yang akan dicapai setiap tahunnya. Pada Kerangka pendanaan diperkirakan besarnya dana APBD dan sumber dana lainnya. Rincian kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2025 Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
5.03	Kepegawaian				5.048.484.574	
5.03.01	Program Pemunjang Urusan Pemerintahan Daerah				4.027.116.974	
5.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				9.750.000	
5.03.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Output: Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah Outcome: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Batusangkar	3 dokumen	3.875.000	APBD
5.03.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA -SKPD	Output: Jumlah dokumen RKA-SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD Outcome: Meningkatnya kualitas dokumen perencanaan	Batusangkar	3 dokumen	4.500.000	APBD
5.03.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Output: Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD Outcome: Meningkatnya kualitas laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Batusangkar	23 laporan	1.375.000	APBD
5.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				3.587.410.011	
5.03.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Output: Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN Outcome: Peningkatan kualitas administrasi keuangan BKPSDM	Batusangkar	30 orang	3.585.410.011	APBD
5.03.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Output:Jumlah laporan keuangan akhir tahun SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD Outcome: Peningkatan kualitas administrasi keuangan BKPSDM	Batusangkar	2 laporan	2.000.000	APBD
5.03.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah				95.735.063	
5.03.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Output: Jumlah paket komponen Instalasi listrik/penerangan Bangunan kantor yang disediakan Outcome: Terpenuhinya kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Batusangkar	3 paket	2.000.000	APBD
5.03.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Output: Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan Outcome: Terpenuhinya kebutuhan logistic kantor	Batusangkar	8 paket	16.388.663	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
5.03.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Output: Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan Outcome: Terpenuhiya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Batusangkar	9 paket	6.546.400	APBD
5.03.01.2.06.0006	Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan	Output: Jumlah dokumen bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan Outcome: Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan	Batusangkar	902 dokumen	6.300.000	APBD
5.03.01.2.06.0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Output: Jumlah laporan fasilitas kunjungan tamu Outcome: terfasilitasinya tamu BKPSDM	Batusangkar	12 laporan	4.500.000	APBD
5.03.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Output: Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD Outcome: Terselenggaranya rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Batusangkar	30 laporan	60.000.000	APBD
5.03.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				7.000.000	
5.03.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Output: Jumlah unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan Outcome: Meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas BKPSDM	Batusangkar	1 unit	7.000.000	APBD
5.03.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				130.060.400	APBD
5.03.01.2.08.0001	Penyediaan jasa surat menyurat	Output: Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat Outcome: Terlaksananya proses pengiriman surat menyurat	Batusangkar	1 laporan	28.364.400	APBD
5.03.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Output: Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan Outcome: Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik kantor	Batusangkar	12 laporan	72.196.000	APBD
5.03.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Output: Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan Outcome: Terselenggaranya jasa pelayanan umum kantor sesuai dengan kebutuhan	Batusangkar	12 laporan	29.500.000	APBD
5.03.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				197.161.500	
5.03.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Output: Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya Outcome: terpeliharanya kendaraan dinas operasional atau	Batusangkar	10 unit	155.500.500	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Sumber Dana
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	
5.03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	lapangan Perangkat Daerah Output: Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara Outcome: Terpeliharanya peralatan dan mesin lainnya	Batusangkar	34 unit	10.000.000	APBD
5.03.01.2.09.0009	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung kantor dan Bangunan Lainnya	Output: Jumlah Gedung Kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi Outcome: Terpeliharanya gedung kantor dan bangunan lainnya	Batusangkar	1 unit	31.661.000	APBD
5.03.02	Program Kepegawaian Daerah				1.021.367.600	
5.03.02.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN		Batusangkar		188.037.500	
5.03.02.01.0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Output: Jumlah dokumen hasil penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN Outcome: Tersusunnya rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk pelaksanaan pengadaan ASN	Batusangkar	1 dokumen	14.000.000	APBD
5.03.02.01.0003	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Output: Jumlah dokumen kegiatan koordinasi dan fasilitasi pengadaan PNS dan PPPK Outcome: Terpenuhinya kebutuhan ASN	Batusangkar	3 dokumen	95.593.500	APBD
5.03.02.01.0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian PNS	Output: Jumlah dokumen hasil kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian Outcome: Terlaksananya proses administrasi pemberhentian ASN sesuai dengan SOP	Batusangkar	350 dokumen	4.444.000	APBD
5.03.02.01.0008	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Output: Jumlah lembaga profesi ASN yang difasilitasi Outcome: Terselenggaranya lembaga profesi ASN	Batusangkar	1 lembaga	50.000.000	APBD
5.03.02.01.0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Output: Jumlah dokumen hasil pengelolaan sistem informasi kepegawaian Outcome: Terkelolanya sistem informasi kepegawaian yang menyediakan data kepegawaian yang update	Batusangkar	1 dokumen	24.000.000	APBD
5.03.02.02	Mutasi dan Promosi ASN				349.277.000	
5.03.02.02.0001	Pengelolaan Mutasi ASN	Output: Jumlah dokumen hasil pelaksanaan mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar daerah Outcome: Terlaksananya pengembangan karier PNS	Batusangkar	400 dokumen	28.139.000	APBD

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp)	Sumber Dana
5.03.02.02.0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Output: Jumlah pengelolaan kenaikan pangkat ASN Outcome: Terlaksananya pengembangan karier PNS	Batusangkar	700 dokumen	20.856.000	APBD
5.03.02.02.0003	Pengelolaan Promosi ASN	Output: Jumlah dokumen hasil pengelolaan promosi ASN Outcome: Terlaksananya pengembangan karier PNS	Batusangkar	30 dokumen	300.282.000	APBD
5.03.02.03	Pengembangan Kompetensi ASN				446.557.300	
5.03.02.03.0001	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Output: Jumlah ASN yang meningkatkan kapasitasnya Outcome: Peningkatan profesionalitas ASN	Batusangkar	95 orang	307.781.800	APBD
5.03.02.03.0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Output: Jumlah ASN yang mendapatkan pendidikan lanjutan Outcome: Peningkatan profesionalitas ASN	Batusangkar	40 orang	138.775.500	APBD
5.03.02.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur				37.495.800	
5.03.02.04.0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Output: Jumlah dokumen hasil pelaksanaan penilaian dan evaluasi kinerja aparatur Outcome: Peningkatan profesionalitas ASN	Batusangkar	1 dokumen	7.903.400	APBD
5.03.02.04.0005	Pengelolaan Tanda Jasa Bagi Pegawai	Output: Jumlah ASN yang diberikan tanda jasa Outcome: Terlaksananya pemberian tanda jasa bagi pegawai	Batusangkar	315 orang	11.500.000	APBD
5.03.02.04.0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Output: Jumlah laporan hasil pengelolaan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN Outcome: Terlaksananya pemrosesan penyelesaian pelanggaran disiplin ASN sesuai dengan ketentuan	Batusangkar	7 laporan	18.092.400	APBD

BAB V

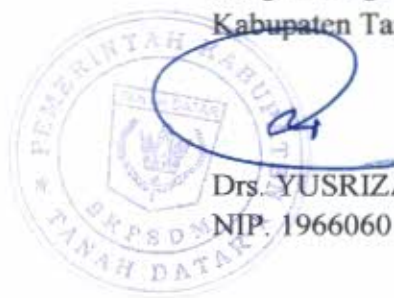
PENUTUP

Perubahan Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar disusun untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar tahun 2025-2029. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja BKPSDM dapat mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar serta target dan sasaran yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar tahun 2025.

Dalam penyusunan Perubahan Rencana kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar memperhatikan realisasi kinerja sampai dengan triwulan II dan perubahan-perubahan regulasi sehingga target kinerja yang diharapkan pada Rencana Strategis dapat tercapai. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Tanah Datar.

Dengan ditetapkannya Perubahan Rencana Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Tanah Datar tahun 2025, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah akan lebih terkoordinasi, terintegrasi, sinergis, dan berkelanjutan antar sesama Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Datar maupun dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi lain.

Batusangkar, 2025
Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Tanah Datar



Drs. YUSRIZAL, MM
NIP. 196606011994031005